

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Anis, Widyawati, *Hukum Pidana Internasional* (Sinar Grafika, Jakarta, 2014).
- BIP Redaksi, 2017, “*3 Kitap Undang-Undang Hukum*”, Bhuana Ilmu, Jakarta
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Edisi Revisi* (Djambatan, Jakarta, 2008).
- Harsono, Budi. 2005. *Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*. Djambatan, Jakarta.
- Idris Zainal, “*Ketentuan Jual Beli Menurut Hukum Perdata*”, Fakultas Hukum USU, Medan.
- Instruksi Presiden (INPRES) No. 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Sosial.
- Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1988.
- Kaharudin, (2016), *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Cet-1*, Pustaka Bangsa, Mataram.
- Lebacqz, Karen, 1989, *Teori-Teori Keadilan*, Bandung: Nusa Media.
- Nandang Alamsyah, *Administrasi Pertanahan*.
- Nur Wahid, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*.
- Ngadino, *Ketentuan Umum Tata Cara Pembuatan dan Pengisian Akta PPAT*.
- Richard Eddy, *Aspek Legal Properti*.
- Rumasukun, Safitriana. “Kualitas Pelayanan Administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam Perspektif Maqāsid Syariah”. Skripsi sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. 2019.
- Ridwan HR (2016), *Hukum Administrasi Negara, cet-12*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soimin Soedharyo, *Status Hak dan Pembebasan Tanah* (Sinar Grafika: Jakarta, 2004).

- Sjaifurrachman, 2011, “*Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*”, Mandar Maju, Bandung.
- Subekti, 2005, “*Hukum Perjanjian*”, PT. Intermedia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta,
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.
- Suratman, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*.
- S.F Marbun Dan Moh. Mahfud M.D, (2011), *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Cet-6, Liberty, Yogyakarta.
- Sirajudin, Didik Sukriono, Winardi, (2016), *Hukum Pelayanan Publik*, Setara Press, Malang.
- Santoso dan Urip. 2005. *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*. Prenada Media Group, Jakarta
- Sumardjono, Maria S.W. 2008 *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Kompas, Jakarta.
- Tambunan, Rudi M, *Pedoman Penyusunan Standart Operating Prosedur* (Maisetas Publishing, Bandung, 2013).
- Urip Santoso, *Pejabat Pembuat Akta Tanah* (Kencana, Jakarta, 2016).
- William J Chamblis and Robert Seidman, *Law, Power and Order*, Dikutip dari Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Wijaya, Andika. *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2022.
- Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia* (Rajawali Press, Jakarta, 2008).

## **B. Jurnal**

- Atika, Sandra Dewi, ‘Peralihan Hak Atas Tanah Terhadap Proses Jual Beli’ (2021) *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol*, Vol. 4 No. 2, hlm. 824-841.
- Ika Widiastuti, ‘Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan di Jawa Barat’ (2017) *Public Inspiration Jurnal Administrasi Publik*, hlm.91-1-101.
- Sandra Dewi Atika, SH, MH, ‘Peralihan Hak Atas Tanah Terhadap Proses

- Jual Beli' (2021) Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol, Vol. 4 No. 2, hlm. 38.
- Ringsih, Kartika Widya dkk, 'Pelaksanaan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali terhadap Tanah yang Belum Besertipikat Melalui Program Nasional Agraria (Prona) di Kantor Pertanahan Jakarta Barat' (2019) Jurnal Notarius, Vol. 12 No. 2, hlm. 828.
- Marhel, Jolanda, 'Proses Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah dalam Perspektif Kepastian Hukum' (2017) Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 46 No.3. hlm.249
- Medan, Korolus K, 'Jual Beli Tanah di Bawah Tangan'(1987)Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 1 No. 1, hlm. 284.
- Prakoso, Bhim, 'Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Dasar Perubahan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah'(2021)Jurnal Privaten and Economic Law, Vol. 1 No. 1, hlm. 68.
- Priyo Amoro F. Yudhi, Elviani, 'Pendampingan Prosedur Pengurusan Balik Nama Sertifikat Tanah Hasil Jual-Beli Di Badan Pertanahan Nasional Melalui Kantor Notaris & Ppat Yusuf Gutomo,SH.,M.Kn' (2021) Conference on Community Engagement Project Vol. 1 No.1.
- Zahry, Vandawati dkk, 'Kajian Hukum & Keadilan 127 Kepesertaan Program Bpjs Kesehatan Di Tengah Wabah Pandemic Covid-19' (2021) Lex Journal, hlm.128.
- Rafiqi, dkk. "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No:98/DSN\_MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Penyelenggaraan BPJS Kesehatan), Jurnal Paradigma Ekonomika. Vol. 16. No.4. 2021.
- Putri,Prima Maharani. "Pelayanan Kesehatan di Era Jaminan Kesehatan Nasional Sebagai Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan". Jurnal Wacana Hukum. Vol. 25. No. 1. 2019.
- Darwin Ginting, 2011. Reformasi Hukum Tanah Dalam Rangka Perlindungan Hak Atas Tanah, Vol. 3. No. 2, Jakarta. Hlm. 4.
- Darwin Ginting, 2012. Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat. Vol. 4. No. 5, Jakarta. Hlm. 2.

- Fandri Entiman, 2013. Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah yang Bersertifikat, Vol. 1. No. 5, Jakarta. Hlm. 54.
- Ilyas Ismail, 2010. Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional. Vol. 12, No. 1, Bandung. Hlm. 50.
- Glory Miliani Ampow, Olij A. Kereh, Vonny A. Wongkar, (2021), Penerapan Diskresi Oleh Presiden Atas Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, Jurnal Lex Administratum, Vol.9 No.3.
- Herman & Hendry Julian Noor, (2017), Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (Beschikking), Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 3 No.1.
- Luthfil Ansori, (2015), Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Jurnal Yuridis, Vol. 2 No.1.
- Mhd. Taufiqurrahman, (2019), Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan, Jurnal Retentum, Vol. 1 No.1.
- Olechan., (2019), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik, Administrative Law & Governance Journal, Issue 4, pg.687.
- Trisna Widada, Agus Pramusinto, Lutfan Lazuardi, (2017), Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat (Studi Di Rsd Hasanuddin Damrah Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu), Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 23 No.2, pg.203.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar 1945

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *Jo* Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2001 tentang pendaftaran tanah

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

Surat Edaran Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Nomor HR.02/153-400/11/2022 tentang pemberlakuan syarat kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Aktif

#### **D. Internet**

Jelita, Insi Nantika 'Ini tanggapan Menteri ATR soal BPJS Kesehatan jadi Syarat Jual Beli Tanah' (Media Indonesia.com, 2022)  
<https://mediaindonesia.com/ekonomi/479729/ini-tanggapan-menteri-atr-soal-bpjs-kesehatan-jadi-syarat-beli-tanah> dikunjungi pada tanggal 21 Oktober 2022.

Ridwan, 'Chairul Anwar: Inpres Jual Beli Tanah Syaratkan BPJS Jangan Sulitkan Masyarakat' (Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2022)  
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37789/t/Chairul+Anwar%3A+Inpres+JualBeli+Tanah+Syaratkan+BPJS+Jangan+Sulitkan+Masyarakat> dikunjungi pada tanggal 21 Oktober 2022.

BPJS Kesehatan, (2021), Kunci Capai Uhc: Komitmen Pemerintah Lindungi Penduduk, [Https://BpjsKesehatan.Go.Id/Bpjs/Post/Read/2021/2128/Kunci-Capai-Uhc-Komitmen-Pemerintah-Lindungi-Penduduk](https://BpjsKesehatan.Go.Id/Bpjs/Post/Read/2021/2128/Kunci-Capai-Uhc-Komitmen-Pemerintah-Lindungi-Penduduk), Diakses Pada Tanggal 20 Desember 2022.

BPJS Kesehatan, (2021), Kaleidoskop Bpjs Kesehatan 2021: Menutup Tahun Dengan Kinerja Gemilang, [Https://BpjsKesehatan.Go.Id/Bpjs/Post/Read/2021/2149/Kaleidoskop-Bpjs-Kesehatan-2021-Menutup-Tahun-Dengan-Kinerja](https://BpjsKesehatan.Go.Id/Bpjs/Post/Read/2021/2149/Kaleidoskop-Bpjs-Kesehatan-2021-Menutup-Tahun-Dengan-Kinerja) Diakses Pada Tanggal 20 Desember 2022.

Jaweng, Robert Na Endi, (2022), Ombudsman Ri Minta Pemerintah Tidak Terburu-Buru Berlakukan Bpjs Sebagai Syarat Pelayanan Publik, Ombudsman Ri Minta Pemerintah Tidak Terburu-Buru

Berlakukan Bpjs Sebagai Syarat Pelayanan Publik - Ombudsman Ri, Diakses Tanggal 18 Desember 2022.

BPJS Kesehatan. “INPRES Nomor 1 Tahun 2022 Dorong Masyarakat Sadari Pentingnya Jaminan Kesehatan”.

<https://www.bpjskesehatan.go.id/bpjs/post/read/2022/2204/INPRES-Nomor-1-Tahun2022-Dorong-Masyarakat-Sadari-Pentingnya-Jaminan-Kesehatan>.

Diakses pada 11 Januari 2023. Pada pukul 20:29 WIB.

Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial di Indonesia.

<https://www.bpjskesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4>

Diakses pada 16 Januari 2022. Pada pukul 10:47 WIB.

Zulfikar, Fahri. “BPJS Jadi Syarat Administrasi, Pakar Unair: Caranya Kurang Bijaksana”, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d5965909/bpjs-jadi-syarat-administrasi-pakar-unair-caranya-kurangbijaksana>.

Diakses pada 20 Januari 2023. Pada pukul 19:57 WIB.

Syarief, Ika Suryani. “BPJS Kesehatan Jelaskan Alasan INPRES 1/22 “Mewajibkan” Kepesertaan Aktif JKN” <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/bpjs-kesehatanjelaskan-alasan-INPRES-1-2022-mewajibkan-kepesertaan-aktif-jkn/>

Diakses pada 20 Januari 2023. Pada pukul 01:37 WIB.